

Dinas Sosial, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, BPKAD serta Inspektorat.

Tugas tim penerapan SPM meliputi menyusun rencana aksi penerapan SPM, melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM, mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik, mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD serta renja PD sampai dengan dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam memenuhi penganggaran untuk penerapan SPM. Terkait pelaporan SPM maka Bupati melaporkan kepada gubernur sebagai Pemerintah Pusat meliputi hasil penerapan SPM, Kendala penerapan SPM, ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM disampaikan bersamaan dengan LPPD setiap tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah berupa administrasi lewat teguran tertulis.

## II. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan dan penerapan SPM di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Minimal Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan.
6. Peraturan Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

## III. Standar Teknis Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Tegal

### a. Bidang Pendidikan

Standar Teknis Pelayanan pada SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal mengatur tentang:

1. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
2. Mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
3. Penerima pelayanan dasar pada:
  - a. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
  - b. SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
  - c. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
4. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah Kabupaten Tegal terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
5. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan

kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar



### b. Bidang Kesehatan

Standar Teknis Pelayanan pada SPM bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Tegal mengatur tentang:

1. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan yang terdiri atas:
  - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. Pelayanan kesehatan balita;
  - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
1. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
2. Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif

- mencakup:
- a. peningkatan kesehatan;
  - b. perlindungan spesifik;
  - c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
  - d. pencegahan kecacatan; dan
  - e. rehabilitasi.

3. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah daerah, maupun swasta dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
4. Selain oleh tenaga kesehatan, untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

### c. Bidang Sosial

1. Standar Teknis Pelayanan pada SPM bidang Sosial di kabupaten Tegal terdiri atas:
  - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
  - b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
  - c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
  - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
  - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.
2. Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dilakukan dengan:
  - a. pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat;
  - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
3. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh

Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:

- a. data dan pengaduan;
- b. kedaruratan;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

**d. Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman**

Standar Teknis Pelayanan pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut.

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Disamping jenis layanan diatas dilaksanakan pula layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

**e. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

Untuk Standar Teknis Pelayanan pada SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencakup Jenis layanan yang dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah yaitu:

1. Layanan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Layanan Kebencanaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk Jenis layanan pertama meliputi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sedangkan jenis layanan kedua meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

**IV. Penutup**

Penetapan standar teknis pelayanan pada SPM di Kabupaten Tegal telah disinkronkan dan diintegrasikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Sinkronisasi dan integrasi tersebut meliputi dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja, jenis program serta alokasi anggaran untuk lima tahun kedepan (2019 – 2024) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pencapaian target pada SPM yang telah ditetapkan maka teknis operasional dari penerapan standar teknis pelayanan dasar tersebut akan diintegrasikan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja) pada semua Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dan untuk dapat melaksanakan standar teknis pelayanan dasar tersebut maka anggaran untuk pelaksanaan setiap jenis layanan tersebut akan dialokasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024.

Pada akhirnya dokumen Standar Teknis Pelayanan pada SPM di Kabupaten Tegal adalah disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tegal.



Penulis adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal. Alumni Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UNS Surakarta, Magister Perencanaan Kota Dan Daerah (sekarang Magisten Perencanaan Wilayah dan Kota) UGM Yogyakarta, serta Urban Management and Development IHS Rotterdam.

**PENTINGNYA LITERASI DIGITAL DI ERA HYPERCONNECTIVITY**

Oleh : Endirah Ekaningrum, S.Kom  
Pranata Komputer Pertama BKPPD Kab. Tegal

**Era Internet untuk segala**

Terminologi teknologi informasi dan komunikasi seperti mengalami perluasan dalam pemefinisannya. Betapa tidak, benda-benda yang awalnya tidak digunakan sebagai alat komunikasi saat ini bisa saling terhubung dengan adanya perluasan konektivitas internet. Selain itu benda-benda tersebut seperti jam tangan, mobil, lemari es, hingga spot area parkir juga dapat menghasilkan data dan informasi dalam format digital. Misalnya lampu lalu lintas dapat secara otomatis mengatur durasi pergantian lampu, saat di kantor kita bisa menyalakan dan mematikan lampu hanya lewat ponsel, ponsel kita bisa berdering jika terjadi sesuatu dengan rumah atau kendaraan pribadi kita. Kondisi inilah yang disebut oleh berbagai pakar sebagai era internet untuk segala (*internet of things, IoT*).

Dalam berbagai kesempatan pemerintah menyampaikan tentang progress pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia termasuk pemerataan akses internet bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri. Disampaikan pula jika proyek Palapa Ring yang merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi yang menggunakan teknologi serat optik yang akan dibentangkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia sudah 100% untuk wilayah barat dan tengah, sementara untuk wilayah timur kurang 10% dan dijanjikan selesai pada Juni 2019.

Pemerintah juga berupaya melibatkan seluruh ekosistem untuk membangun dan mengembangkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi era digital ini. Salah satunya melalui Kominfo pemerintah membuat sebuah gerakan yang diberi nama 'Siberkreasi' yang melibatkan korporasi, swasta, operator telekomunikasi, NGO Civil Society Organization (CSO) dan juga para selebritas. Melalui gerakan 'Siberkreasi' ini Kominfo ingin merangkul komunitas dan ekosistem untuk menyebarkan konten positif dan turut mendorong masuknya konten literasi digital dalam kurikulum pendidikan bekerjasama dengan Kemendikbud.

Beragam jumlah manajemen informasi dunia menganggap kehidupan masyarakat dewasa ini akan mengalami *hyperconnectivity* (konektivitas hiper). Dengan fitur kecerdasan buatan yang saling berinteraksi, otomatis dan interoperabilitas (kemampuan saling bekerja sama) dari sebuah teknologi akan mempengaruhi manusia untuk semakin bergantung pada teknologi. Dimana berdasarkan hasil survey APIJI tahun 2017 separuh lebih dari masyarakat Indonesia memiliki perangkat smartphone yang akan semakin memungkinkan mereka bergantung pada ponsel pintar mereka.



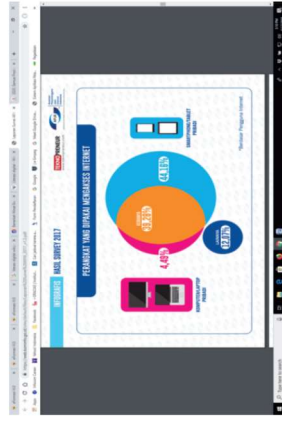
Media massa pun berbondong-bondong pindah haluan ke media baru atau internet karena adanya pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemajuan teknologilah yang memaksa media massa harus berubah dalam menyampaikan informasi karena kebutuhan masyarakat dalam menerima informasi sudah beralih ke media baru atau internet. Kemampuan media baru inilah yang lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat hanya lewat genggaman tangan saja.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APIJI) mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan di Tahun 2018 mencapai angka 171,17 juta jiwa. Di Tahun 2017 pemanfaatan internet di bidang gaya hidup didominasi oleh penggunaan social media hingga 87.13%.





Pada survey yang sama di Tahun 2017 juga bahwa hampir 50 % masyarakat mengakses internet lewat ponsel pintar/ tablet pribadi mereka. Cal Newport, profesor muda asal Georgetown University, dalam bukunya *Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World* mengatakan kemampuan fokus pada masa depan menjadi semakin langka di tengah maraknya notifikasi gawai yang adiktif. Semakin banyak aplikasi yang diunduh, maka semakin sulit pula untuk mengatasi adiksi terhadap pemakaian ponsel yang berlebihan.



Bagaimanapun perkembangan teknologi informasi di era digital ini dengan segala manfaatnya memang patut kita sambut dengan baik namun harus tetap memperhatikan resiko-resikonya. Karena perkembangan teknologi yang tidak diikuti dengan kesiapan sumberdaya manusianya justru bisa menjadi bencana. Seperti halnya jika dilihat secara individu masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak dapat memanfaatkan kemunculan era digital sebagai sesuatu yang positif.

Banyak orang yang justru terjebak dalam

penerimaan kemunculan digital yang menjadikan manusia kehilangan etika, moral, dan budaya. Contoh sederhانا: Saat dosen tengah menjelaskan materi tidak sedikit mahasiswa yang asyik bermain dengan gadgetnya; cek instagram, facebook, twitter dan lain-lain tanpa peduli bahwa dosen yang sudah menjelaskan atau berbicara. Tentu kita juga sedang sering mendengar berita mengenai penculikan atau penipuan yang menggunakan media sosial atau masyarakat yang jadi lebih konsumtif karena dijejali dengan berbagai produk onlineshop. Di era digital ini ujung dari "lidah digital" ini adalah jempol warganet, jangnan sampai otak kalah cepat dengan jempolnya.

Untuk itu menyiapkan masyarakat yang siap menghadapi perkembangan teknologi menjadi sangat penting melalui pendidikan literasi digital. Masyarakat harus segera disiapkan agar mampu memilih dan memilah konten yang mereka dapatkan di media berbasis internet. Mereka harus mampu menggunakan media sosial dengan bijak dan pentingnya menyadari jika internet bisa jadi sumber informasi bermanfaat, tapi juga mungkin menjadi peluang kejahatan.

Orang tua juga perlu dibekali cara untuk memilih dan memilah konten bagi anaknya di internet. Jangan hanya mampu memberikan perangkannya tapi harus dapat berperan serta mengawasi penggunaannya agar tidak menimbulkan keresahan yang akhirnya memunculkan hoax, cyberbullying, radikalisasi dan pornoaksi.

**Literasi digital**

Ditinjau dari beberapa sumber literasi digital dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Menurut Tim Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud, literasi digital adalah menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menurut literatur Kerangka Literasi Digital yang diterbitkan oleh Kominfo Publisher

Tahun 2018, literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengkomunikasikan konten/informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal.

3. Menurut Colin Lankshear dalam bukunya *Digital literacies : concepts, policies and practices*, literasi digital lebih cenderung pada hal hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan lingkungan digital.

Namun pada kenyataannya literasi digital masih cenderung dipahami secara sempit yang terbatas pada penguasaan dalam penggunaan teknologi saja. Menurut Dosen Departemen Administrasi Universitas Airlangga Agie Nugroho Soegiono bahwa literasi digital semestinya juga meliputi aspek-aspek kritis lain seperti kesadaran data (*data awareness*, kemampuan analisis data, dan kemampuan untuk fokus (*deep work*):

1. Data Awareness  
Kesadaran data selama mengakses internet. Data menjadi sebuah komponen vital dalam setiap sistem aplikasi yang saling berinteraksi dan bertransaksi dalam dunia siber. Hanya dengan mendaftarkan diri ke sebuah platform, data kita akan secara otomatis disinkronisasikan ke dalam sistem. Misalnya, ketika mensinkronkan aplikasi *Instagram* ke *Facebook*, Anda harus sadar telah mengizinkan segala data percakapan dari akun Anda untuk dapat diakses oleh kedua platform agar sosial tersebut. Walau pengguna akan mendapatkan beragam keuntungan dari proses sinkronisasi tadi, ada konsekuensi-konsekuensi lain yang harus dipertimbangkan.
2. Kemampuan Analisis Data  
Tidak hanya meleak dalam memahami konsekuensi dari diseminasi data digital, tapi juga memahami data yang masuk agar menjadi informasi yang berguna. Pada era *IoT*, menjadi tantangan tersendiri untuk mencerna data yang masuk dengan volume, kecepatan, dan varietas yang besar. Analisis data berarti bagaimana kita berusaha merjemahkan kondisi dari data yang ada dan membuat keputusan dengan lebih akurat.

Contoh, statistik langkah kaki dan detak jantung yang direkam secara otomatis lewat jam tangan pintar akan meningkatkan kesadaran kita akan kebutuhan pola olahraga dan makan yang teratur.

3. Deep Work  
Internet untuk segala bukan hanya identik dengan fenomena disrupsi, melainkan juga gejala distraksi yang ditimbulkan oleh penerimaan informasi dan data yang sangat besar, beragam, dan cepat. Sebuah studi lembaga riset menemukan bahwa rata-rata generasi milenial mengecek telepon pintar mereka sebanyak 150 kali setiap hari. Perilaku ini menjadikan mereka tidak bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di depan mata. Akibatnya, ponsel digital yang seharusnya membantu manusia untuk meningkatkan dan mempercepat produktivitas malah menjadi penghambat kinerja.

Literasi digital sebagai kompetensi bukan hanya kemampuan penggunaan teknologi, tapi juga meliputi kemampuan menganalisis, berpikir kritis, sampai dengan kontrol dari penggunaannya yang adiktif. Aspek-aspek itu menunjukkan bahwa kemampuan penggunaan fitur digital belum secara otomatis membuat kita melek akan konsekuensi dan kegunaan dari data digital yang dihasilkan. Tanpa kemampuan untuk merjemahkan data, maka menerima, memiliki, dan menyimpannya pun mungkin tidak akan ada gunanya.

Menurut Tim Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud pengembangan literasi digital memiliki empat prinsip dasarnya yaitu :

1. Pemahaman untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit dari media
2. Saling ketergantungan antara media yang satu dengan media yang lain
3. Faktor sosial menentukan keberhasilan jangka panjang media yang membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri
4. Kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi, menyimpannya agar dapat diakses kembali.

Adapun Kerangka literasi digital Indonesia adalah:

1. Proteksi (safeguard), yaitu perlunya kesadaran atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring serta privasi individu dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan.
2. Hak-hak (right), yaitu hak kebebasan berekspresi yang dilindungi, hak atas kekayaan intelektual, dan hak berserikat dan berkumpul
3. Pemberdayaan (empowerment), yaitu pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya produktif, jurnalisme warga, dan kewirausahaan serta hal-hal terkait etika informasi.

Sedangkan elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital adalah sebagai berikut:

- Kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital;
- Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten;
- Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual;
- Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital;
- Kepercayaan diri yang bertanggung jawab;
- Kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru;
- Kritis dalam menyikapi konten; dan bertanggung jawab secara sosial

Seekretaris Jendral APJII, Henry Kasyfi Soemartono mengusulkan dalam kaitannya untuk meminimalisir konten negatif internet yang berisi hoax, selain memaksimalkan capaian literasi digital oleh Kominfo juga dapat dibentuk lembaga informasi independen yang berfungsi memwadhahi masyarakat untuk mengesahkan kebenaran suatu konten yang banyak beredar di internet.

Sebenarnya sebagian besar dari para pengguna internet tersebut sadar betul bahwa keamanan internet tidak bisa dijamin, ada kemungkinan pencurian data maupun penipuan dengan berbagai modus di internet. Namun sayangnya masih banyak pengguna internet di Indonesia percaya dengan kebenaran informasi di dunia maya tanpa pengecekan ulang lebih dulu yang akhirnya kebohongan menjadi mudah disebarkan oleh pengirim dan para penerimanya.

Menurut Henry lagi, masyarakat Indonesia termasuk tipe yang gemar menyebarkan informasi tapi sulit mengetahui sumber kebenarannya dan lebih sering mengetahui konten tersebut adalah hoax justru setelah menyebarkannya.

Kesimpulannya dari literasi digital adalah bagaimana membuat individu berfikir cerdas dalam kemunculan era budaya digital, karena jika tidak justru era digital akan membuat kemunduran nilai-nilai manusia itu sendiri. Jangan sampai smart phone lebih pintar dari penggunaanya dan menyeret kita dalam pusaran era digital yang justru merusak dan bukan memberikan manfaat.

## SAYANGI RAKYAT, HAPUSKAN SISTEM KAPITALIS BIROKRAT DEMI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Oleh : Patriawati Narendra, SKM  
Staf Sekretariat P3A & P2KB

**K**ABIR atau singkatan dari Kapitalis Birokrat sudah sejak lama mendera bangsa kita, bagaimana tidak, berangkat dari sistem feodal jaman dahulu merupakan warisan sistem sekaligus menjadi tradisi yang terus mempengaruhi mindset yang anehnya masih ada yang terus melestarikan sistem ini. Mengapa ini bisa terjadi? KABIR lestari karena sifat keegoisan manusia, karena sifat keserakahannya manusia, mindset untung rugi yang terus dikembangkan sehingga membuat semua kontribusi menjadi hal yang perlu diperhitungkan, sungguh menjadi suatu kemunduran, melambatkan apabila sistem KABIR ini masih terus dilanjutkan. Keegoisan ini akan berujung pada ketidakadilan yang dapat mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan masyarakat. Sungguh sistem yang sangat merugikan semua elemen masyarakat, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan, harus diimplementasikan diberbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kapitalis birokrat merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum birokrat baik yang memegang kendali kekuasaan negara di tingkat nasional hingga tingkat kabupaten atau kota yang secara langsung melayani kepentingan imperialisme untuk memperkaya dirinya sendiri dan keluarga atau untuk mengumpulkan kapital untuk mempertahankan dan menaikkan posisinya dalam pemerintahan. Kapitalis birokrat tak ubahnya benalu yang sangat mengganggu sistem feodalisme dalam masyarakat, tak segan untuk membela imperialis hanya demi keuntungan

pribadi dan kroni tetapi mengorbankan semua kepentingan rakyat, tak peduli dengan semua aspirasi dan keinginan rakyat serta tak empati terhadap beban penderitaan rakyat. KABIR dengan berjalannya waktu akan melahirkan mafia-mafia, makelar kasus dan tentunya apalagi kalo bukan korupsi. Rakyat seakan terpedaya oleh kekuasaan dan kewenangan yang berbalut kapitalis, informasi untuk publik menjadi terbelenggu dan tidak adanya transparansi sistem pelaporan keuangan dan minimnya keterbukaan untuk publik.



Gambar 1. Ilustrasi Korupsi

Korupsi dan sistem kapital sangat merugikan rakyat, mematikan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, mengurangi hak dan keadilan untuk rakyat karena motivasinya hanya untuk kemakmuran pribadi dan kroni, sungguh menyedihkan...sungguh merupakan suatu pembodohan rakyat, rakyat dipaksa untuk bangkang dengan menutup berbagai akses saluran informasi yang ada dan menekan kran keterbukaan publik, sehingga dengan keegoisan sistem birokrasi ini semakin menjadi angkuh dan sekaligus menyebabkan ketakutan masyarakat untuk mengkritisi dan memberikan masukan



terhadap pemangku kepentingan hingga Bung Karno mengatakan “Indonesia adalah bangsa yang sakit, tanpa karakter, dan masyarakatnya sudah terlanjur parah sakit, ada dalam lubang apatisme, tak mau cari jalan keluar, pasrah dan tumpul—mentalnya, “mentaltempe”.

Mindset awal yang salah bermula dari rekrutmen pegawai negeri yang sudah bukan rahasia lagi yaitu fenomena “menyogok” yang nantinya akan menciptakan generasi birokrat yang kapitalis, minim idealisme dan menyuburkan lahan korupsi, kembali lagi rakyat yang akan menaui akibatnya dari penetapan sistem yang salah tersebut. Mindset pencari untung akan menghiasi ranah birokrasi, memanipulasi anggaran, dan melakukan kongkali kong dengan rekanan proyek hanya untuk meraup untung untuk pribadi dan kroni, hal tersebut jelas akan memandulikan empati, peduli dan mengasahi.

Rakyat harus dibahagiakan, disejahterakan, dimakmurkan, diberikan keadilan yang seadil-adilnya bahwasanya negara ini harus hadir untuk meringankan semua beban penderitaan rakyat, jangan semua kesulitan dan kesusahan rakyat. Jangan dertakkan rakyat karena tanpa rakyat apalah artinya negara ini. Kapitalisme atau Kapitalis adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah yang memiliki mindset kapitalis birokrat ini tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah versi Kabir ini dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi,

terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.

Kapitalisme cenderung akan memberikan dampak kerugian materi dan immateri bagi kemajuan bangsa, kerugian materi antara lain jelas dengan birokrat yang bermental korup, kapitalis, akan memanipulasi anggaran, mengkorupsi anggaran yang ada dengan berbagai cara dengan menutup semua akses keterbukaan publik. Menyuburkan paham penjilat dan ABS (Asal Bapak Senang) sehingga akan melemahkan ide, aspirasi, saran, masukan dan mematahkan kreatifitas berpikir dan bertindak serta mematikan *quick response* beserta *problem solving* yang ada karena sifat dari kaum kapitalis adalah egoistis feodal yang tidak membutuhkan masukan saran dari orang lain.

Progresifitas kemajuan menjadi sangat mustahil dan stagnan, karena praktis semua imajinasi, kreasi, kreatifitas dan pemikiran orang lain selalu salah dan tidak tepat sehingga akan memunculkan paham “Im The Best and always The Best, You..worst”. Mindset pemikiran yang sangat melemahkan dan mengingkari cita-cita kemajuan pembangunan Indonesia. Dampak dari mindset egoistis ini akan menyebabkan lambatnya suatu perubahan, lambatnya *quick response* dan tidak adanya progresifitas peningkatan kemajuan, menjadi *stagnant*, lemah, angkuh tetapi anehnya tidak mau berintrospeksi dan memperbaiki.



Gambar 2. Ilustrasi Kapitalis Birokrat

Pembuatan kebijakan menjadi timbang sebelah, tidak memihak kepentingan rakyat, semena-mena dan tidak peduli dengan segala kesusahan dan penderitaan rakyat. Cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok dan mengesampingkan dampak penderitaan rakyat. Praktek kolusi dan korupsi menjadi sangat biasa bagi kalangan Kapitalis Birokrat, memanfaatkan semua kewenangan dan jabatannya hanya untuk menguntungkan sekelompok orang dan golongan dan sekaligus menyebabkan matinya rasa peduli dan empati terhadap keberlangsungan hidup rakyat.

KABIR akan menelurkan warisan dan tradisi yang merugikan, melanggengkan pungli, jual beli jabatan, makelar kasus, mafia proyek, suap menyuap, tradisi amplop, dan pemberian gratifikasi, hal ini dikarenakan untuk memulihkan modal dan menjadi kapal keruk untuk mengeruk semua keuntungan dari kekayaan negara sekaligus mengambil uang rakyat dengan berbagai cara dan upaya serta melindungi kroni untuk melestarikan tradisi dan kebiasaan korup. Oleh karenanya KABIR akan mempersulit kontrol dari rakyat terhadap kebijakan/pelaksanaan administrasi dan pengalokasian serta pendistribusian anggaran.

Pelayanan prima menjadi sebuah kiasan dan motto yang hanya terpajang tanpa diikuti oleh implementasi pelaksanaan di lapangan, prosedur pelayanan masyarakat yang lama dan birokrasi yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan rakyat untuk mendapatkan akses pelayanan masyarakat. Pelayanan menjadi mahal dan tidak berkualitas, respon menjadi sangat lambat dan diskriminasi. KABIR akan memundurkan kemajuan yang

selama ini dirintis oleh para pendiri negeri, oleh karena itu mari limitasi KABIR dengan cara mengasahi rakyat, sayangi rakyat, tumbuhkan empati dan peduli kepada rakyat tanpa melihat ras, agama, suku, kepercayaan, bahwasannya Indonesia bangsa yang merdeka karena bersatu padu dalam bingkai semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Mari tumbuhkan kesadaran untuk lebih memahami keadaan rakyat, mengerti dan ikut merasakan penderitaan rakyat agar dapat meminimalisir korupsi, kolusi, tradisi pungli, gratifikasi, suap menyuap, dll. Jadikan Masyarakat kita menjadi masyarakat pembelajar (*Learning Society*) untuk mampu melawan tekanan, ancaman, berpikir demokratis, terbuka, kritis, *welcome* terhadap perubahan dan perbaikan, mempertahankan prinsip kebenaran dan kepedulian sosial, membentuk jejaring komunitas dan organisasi agar ilmu pengetahuan, pemikiran dan wawasan bertambah, menghilangkan mindset egoistis dan *scarcity mentality* atau mentalitas berkekurangan, sedih melihat orang sukses dan senang melihat orang gagal, yang sangat jelas akan menghambat kemajuan pembangunan di Indonesia. Indonesia akan sukses apabila birokrat-birokrat negeri mampu menghilangkan paham KABIR sehingga semua hajat hidup rakyat akan terlayani, tercukupi dan terlindungi dari ancaman dampak globalisasi yang semakin memekam. Tanpa KABIR INDONESIA JAYA, SEJAHTERA, MAKMUR DAN DAPAT MENCAPAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA!!



### **Biodata Penulis**

Naskah ini ditulis oleh Patriawati Narendra, SKM staf Sekretariat P3A & P2KB

Background pendidikan : S1 FKM Jurusan Epidemiologi dan Penyakit Tropik UNDIP  
Tugas Belajar Magister Epidemiology UNDIP  
Awardee PPSDM Kemenkes RI Tahun 2017

Prestasi : 1. Juara I AMINEF Fulbright USA *Veteran's Day* quiz 2015  
2. Juara I *Speech Contest with title "National Discipline Movement"* Tahun 2001  
3. 10 Penulis Naskah Terbaik Mozaheksa PPI Perancis 2016 dengan judul "Kutambatkan Mimpiku Di Prancis"  
4. Juara 2 Lomba Menyanyi Telkomsel *Gathering* 2004.  
5. Juara 1 Pesona Citra Kartini Kabupaten Tegal Tahun 2018

Tulisan : Beberapa artikel kesehatan sudah diterbitkan oleh DISHUBKOMINFO melalui website Pemkab Tegal ([www.tegalkab.go.id](http://www.tegalkab.go.id)) diantaranya tentang Penyakit Polio, DBD, Kanker, dan Lansia, Artikel lain mengenai Virus Zika, Kesuksesan Teknologi Belanda, dan Vision, Kiprah dan Pengabdian RSUD Dr. Soeselo Untuk Masyarakat telah diterbitkan Bappeda Kab Tegal.

Pengalaman Organisasi : Pengalaman organisasi sejak SD sampai SMA adalah Pramuka dengan jabatan Ketua Regu dan jabatan terakhir Pradana Putri Ambalan Gana Putra Prajna Paramitha SMA N 1 Kendal. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi sekaligus menjadi pengurus IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) Kab Tegal, Pemuda Pancasila Kab. Tegal, Divisi Kementerian Luar Negeri BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UNDIP dan Kepala Bidang Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Rakyat Anti Madat GERAM Provinsi Jawa Tengah.